

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa/11 Desember 2012
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: A. Membahas Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun Anggaran 2012 B. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 C. Masalah Lain-Lain
Ketua Rapat	: Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP, M.Si/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya. B. 30 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 dibuka pukul 14.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan pembahasan tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun Anggaran 2012, evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 dan masalah lain-lain.
3. Menteri Dalam Negeri menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - A. Realisasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 mencapai sebesar 86,73% atau sebesar Rp.14.939.058.278.326,- dari pagu anggaran sebesar Rp.17.225.033.819.000,-.
 - B. Terkait dengan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dari saldo temuan pemeriksaan sebanyak 47 rekomendasi senilai Rp.79,2 milyar, telah ditindaklanjuti berupa penyetoran ke Kas Negara daengan melengkapi bukti administrasi, melengkapi bukti pertanggungjawaban senilai Rp.3 milyar dan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp.4,5 milyar. Adapun rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian adalah terhadap

pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap pada Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.71,19 milyar.

- C. BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas program penerbitan Nomor Induk Kependudukan Nasional (NIK Nasional) dan penerapan KTP elektronik berbasis NIK Nasional pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
 - D. Terkait dengan perkembangan pelaksanaan program e-KTP, khusus mengenai perekaman e-KTP dengan target 172.015.400 wajib e-KTP dengan batas waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, target tersebut telah tercapai pada tanggal 6 November 2012. Sedangkan sampai dengan tanggal 23 November 2012 hasil perekaman e-KTP sudah mencapai 173.325.276 wajib KTP.
 - E. Terkait dengan fisik e-KTP, dengan target dapat diselesaikan pada akhir tahun 2012 sejumlah 172.015.400 keping, namun berhubung sebagian anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan fisik e-KTP tersebut (Rp.1,045 triliun) belum tersedia pada tahun anggaran 2012, sehingga sebagian fisik e-KTP akan diselesaikan pada tahun anggaran 2013.
 - F. Mengenai perubahan UU. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk merubah masa berlaku e-KTP dari 5 tahun menjadi seumur hidup, pada saat ini sedang diharmonisasikan oleh Kementerian Hukum dan Ham, dan dalam waktu dekat akan disampaikan kepada Badan Legislasi DPR RI.
 - G. Data agregat kependudukan per-kecamatan atau DAK-2 telah diserahkan secara serentak pada tanggal 6 Desember 2012 oleh Menteri Dalam Negeri kepada Ketua KPU, oleh Gubernur kepada Ketua KPU Provinsi dan oleh Bupati/Walikota kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.
4. Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- A. Realisasi anggaran BNPP Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 baru mencapai sebesar 66,16% atau sebesar Rp.130.831.713.500,- dari pagu anggaran sebesar Rp.197.741.693.000,-.
 - B. Terkait dengan ikhtisar hasil pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun Anggaran 2012, jumlah temuan dan nilai kerugian Negara berdasarkan proses penyelesaiannya secara rinci sebagai berikut:
 - 1) Kerugian negara dengan status sudah penetapan
Sampai dengan Semester I Tahun 2012 belum ada penetapan atas kasus kerugian Negara di BNPP
 - 2) Kerugian negara dalam proses penyelesaian ganti kerugian negara
Sampai dengan Semester I Tahun 2012 belum ada kasus kerugian negara pada BNPP yang sedang dalam proses penyelesaian ganti kerugian negara.
 - 3) Kerugian negara yang masih berupa informasi indikasi kerugian negara.
Jumlah kerugian negara yang masih berupa informasi indikasi kerugian negara di lingkungan BNPP pada Semester I Tahun 2012 adalah sebanyak 3 temuan senilai Rp.8.367.117.668,22

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan seluruh jajarannya yang mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari BPK RI terkait dengan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011. Selanjutnya Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menindaklanjuti temuan BPK terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap pada Kementerian Dalam Negeri senilai Rp71,7 milyar, sesuai dengan rekomendasi BPK.
2. Terhadap realisasi penyerapan anggaran Kementerian Dalam Negeri yang sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 mencapai sebesar 86,73% (Rp.14.939.058.278.326,- dari pagu anggaran sebesar Rp.17.225.033.819.000,-), Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran pada waktu yang tersisa hingga bulan Desember Tahun 2012.
3. Terkait dengan program e-KTP, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera melakukan upaya penyelesaian pelaksanaan program ini pada daerah-daerah yang belum mencapai target, serta mempercepat proses penerbitan dan pendistribusian fisik e-KTP di seluruh Indonesia serta lebih fokus menuntaskan DAK-2 dan DAK-4 untuk kepentingan Pemilu Tahun 2014.
4. Komisi II DPR RI mendukung untuk diprioritaskannya pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni yang bersifat lebih komprehensif untuk dibahas pada awal Tahun 2013.
5. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang telah menindaklanjuti temuan-temuan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2012. Selanjutnya, Komisi II DPR RI meminta kepada BNPP untuk segera menindaklanjuti temuan BPK yang masih dalam proses penyelesaian, terutama pada temuan indikasi kerugian negara sebesar Rp8.367.117.668,22 yang baru selesai ditindaklanjuti sebesar Rp6.663.480.753,-, sesuai dengan Rekomendasi BPK.
6. Terhadap realisasi penyerapan anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 baru mencapai sebesar 66,16% (Rp.130.831.713.500,- dari pagu anggaran sebesar Rp.197.741.693.000,-), Komisi II DPR RI meminta kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran pada waktu yang tersisa hingga bulan Desember Tahun 2012.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.05 WIB.

KETUA RAPAT,

ttd

Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP,M.Si

A-219